



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 56/G/2020/PTUN.KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:-----

Nama : **Ir. SAFILI**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Trans Halmahera, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Oktober 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

LA ODE BUNGA ALI, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Sapati Manjawari Nomor 14A, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik: aliode538@gmail.com;-----

untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

**melawan:**

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU**;-----

Tempat Kedudukan: Jalan Sijawangkati Nomor 9, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1068/SKU-74.72.MP.01.01/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020, memberikan kuasa kepada;-----

1. Nama : Waode Sitti Hasnah, S.SiT., M.M.;-----

NIP : 19740629 199603 2 001;-----

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I/Gol. III/d;-----

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Baubau;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 56/G/2020/PTUN.KDI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Sudarmin;-----  
NIP : 19721212 199403 1 005;-----  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I/Gol. III/b;-----  
Jabatan : Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan  
Perkara, Kantor Pertanahan Kota Baubau;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
3. Nama : Dwi Almushawir Zuliadi, S.H.;-----  
NIP : 19951104 201903 1 002;-----  
Pangkat/Golongan : Penata Muda/Gol. III/a;-----  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Penanganan Sengketa,  
Konflik, dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Baubau;-  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
4. Nama : Rizaldi Nograha;-----  
No. Kontrak : 23/SPK-74.72.UP.02.01/I/2020;-----  
Pangkat/Golongan : -  
Jabatan : Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;-----  
Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
5. Nama : Reni Angraeni;-----  
No. Kontrak : 8/SPK-74.72.UP.02.01/I/2020;-----  
Pangkat/Golongan : -  
Jabatan : Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;-----  
Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
6. Nama : Akbar Sarana Palayati;-----  
No. Kontrak : 3/SPK-74.72.UP.02.01/I/2020;-----  
Pangkat/Golongan : -  
Jabatan : Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;-----  
Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Keenamnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Baubau, Jalan  
Sijawangkati Nomor 09 Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau,  
Domisili elektronik: sengketakantahbaubau@gmail.com;-----  
untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 56/G/2020/PTUN.KDI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 56/PEN-DIS/2020/PTUN.KDI., tanggal 4 Desember 2020, tentang Lolos Dismissal Proses;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 56/PEN-MH/2020/PTUN.KDI., tanggal 4 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 56/PEN-PPJS/2020/PTUN.KDI., tanggal 4 Desember 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 56/PEN-PP/2020/PTUN.KDI., tanggal 4 Desember 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 56/PEN-HS/2020/PTUN.KDI., tanggal 12 Januari 2021, tentang Hari Persidangan Pertama;-----
6. Surat Penggugat, tanggal 5 Januari 2021, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat Perkara Nomor: 56/G/2020/PTUN.KDI.;-----
7. Berkas Perkara Nomor: 56/G/2020/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tanggal 21 November 2020 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari melalui *e-court*, tanggal 3 Desember 2020, dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor: 56/G/2020/PTUN.KDI.;-----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan, pada pokoknya, meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 03129 Kelurahan Sulaa, tanggal 8 November 2017, Surat Ukur Nomor 01985/2017, seluas 7.005 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Zanudin dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 03083 Kelurahan Sulaa, tanggal 8 November 2017, Surat Ukur Nomor 01974/2017, seluas 5.432 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Hariyono (untuk selanjutnya disebut objek sengketa);-----

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 56/G/2020/PTUN.KDI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 56/G/2020/PTUN.KDI, masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan yang selengkapannya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Penggugat, tertanggal 5 Januari 2021, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat Perkara Nomor: 56/G/2020/PTUN.KDI, yang disampaikan kepada Majelis Hakim oleh Kuasa Hukum dari Penggugat pada saat pemeriksaan persiapan tanggal 12 Januari 2021, yang isi suratnya, pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut Gugatan Perkara Nomor 56/G/2020/PTUN.KDI., karena objek Gugatan Penggugat Perkara Nomor 56/G/2020/PTUN.KDI., sama dengan Perkara Nomor 50/G/2020/PTUN.KDI.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "TENTANG DUDUKNYA SENGKETA" di atas;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan Gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:-----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*-----
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahapan Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan Gugatan sehingga pihak Tergugat belum menyerahkan Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;-----

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 56/G/2020/PTUN.KDI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2021 Majelis Hakim menerima Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 18 Januari 2021 perihal Permohonan Pembatalan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 56/G/2020/PTUN.KDI., dan atas surat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasanya Hakim Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 56/PEN-HS/2020/PTUN.KDI., tanggal 12 Januari 2021, tentang Hari Persidangan Pertama yang pada pokoknya menetapkan agenda sidang pembacaan penetapan sikap Majelis atas permohonan pencabutan Penggugat tertanggal 5 Januari 2021, ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2021, yang mana demi tertibnya administrasi teknis dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Majelis Hakim berpendapat untuk tetap mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dan karena meskipun pencabutan gugatan tersebut dikabulkan tidaklah menghilangkan hak gugat dari Penggugat untuk mengajukan gugatan kembali;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor: 56/G/2020/PTUN.KDI., dari Buku Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 56/G/2020/PTUN.KDI., telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor: 56/G/2020/PTUN.KDI., dari Buku Register Perkara;---
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp479.500,00-, (Empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh: RACHMADI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NIDAUL KHAIRAT, S.H.I., S.H., M.Kn., dan MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 56/G/2020/PTUN.KDI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KRISNAWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

**NIDAU KHAIKAT, S.H.I., S.H., M.Kn.**

ttd

**RACHMADI, S.H.**

ttd

**MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**KRISNAWATI, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran            | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses           | : Rp. 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. 247.500,- |
| 4. PNBP                   | : Rp. 20.000,-  |
| 5. Meterai                | : Rp. 12.000,-  |
| 6. Redaksi                | : Rp. 10.000,-  |
| 7. Leges                  | : Rp. 10.000,-  |

Jumlah : Rp. 479.500,- (Empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 56/G/2020/PTUN.KDI.